

ABSTRAK

Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh komunitas atau Negara yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan dan kesejahteraan yang seimbang antara masing-masing wilayah yang bersangkutan. Kepulauan Riau merupakan Provinsi terdepan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapore, Filipina, dan Thailand. Kondisi wilayah pulau-pulau di Kepulauan Riau (KEPRI) sangat jauh dipisahkan oleh lautan, dengan Luas Wilayah 252.601 km² yang terdiri dari 1.350 pulau dan 96% Lautan sehingga membuat rentang kendali pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan sangat sulit. Penelitian ini akan melihat bagaimana *Agenda Setting* yang dilakukan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah perbatasan KEPRI, dimana akan membahas aliran masalah dan aliran politik dalam agenda kebijakan sampai ke kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Riau, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BNPPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengumpulan data-data dokumen tertulis maupun tidak tertulis, dan observasi non-partisipan.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, aliran masalah menjelaskan isu dan masalah yang terjadi di perbatasan KEPRI yakni masalah terbatasnya infrastruktur seperti sarana dan prasarana dasar seperti sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan, sarana kesehatan, keamanan, kemudian juga sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan lainnya menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dari wilayah sekitarnya. *Kedua*, aliran Politik menjelaskan proses kebijakan kemudian pandangan dan tujuan yang akan dicapai masih memiliki persepsi tentang pembangunan perbatasan masih berbeda, tingkat partisipasi masyarakat, NGO, Akademisi dan LSM masih relatif rendah, penanganan masih parsial, bersifat sektoral dan belum integritasi, koordinasi belum berjalan dengan baik, baik antara sektoral, tingkat pusat maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, komitmen dan anggaran pembangunan perbatasan di daerah relatif masih minim. *Ketiga*, Aliran Kebijakan menjelaskan beberapa prioritas yang muncul yakni, pengembangan industri pengolahan, perikanan dan kelautan serta pariwisata secara berkelanjutan guna mendukung sektor kemaritiman, peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, serta kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat, Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar pulau serta sarana dan prasarana dasar masyarakat, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berbudaya, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Agenda Setting, Perencanaan Pembangunan, Perbatasan

ABSTRACT

Bondary not only separate territories that are owned by different communities or countries but also ensure the safety and well-being balanced between each area concerned. Riau Islands Province is leading directly adjacent to neighboring countries such as Malaysia, Singapore, the Philippines, and Thailand. The conditions Kepulauan Riau Province are very much separated by an ocean, the area is 252 601 km² area consisting of 1,350 islands and 96% Ocean thus making control range of the government in development planning very difficult. This study will look at how the government's agenda setting in the border area development planning Kepulauan Riau Province, it will discuss the issue and political currents flow in the policy agenda to the policies made by the government of Riau islands as border regions.

The method used in this study is qualitative. The study was conducted in Regional Development Planning Board (Bappeda) Riau Islands Province, the Regional Border Management Agency (BNPPD) Riau Islands Province and Commission III of the House of Representatives (DPRD) Riau Islands Province. Data collection techniques performed in this study were interviews, collecting data document written and unwritten, and non-participant observation.

Results from this study is first, the flow of matter to explain the issues and problems that occur on the border of Riau Islands namely the problem of limited infrastructure such as facilities and infrastructure such as facilities and infrastructure of housing, education, health, security, and also facilities and transport infrastructure, telecommunications, and other causes of this region have low accessibility and isolated from the surrounding region. Secondly, the flow of Politics explains the policy process and then view and objectives to be achieved still has a perception about the construction of the border is still different, the level of public participation, NGOs, academics and NGOs are still relatively low, the handling is still partial, sectoral and yet integritasi, coordination has not gone good, both among sectoral, national level and between the central government and local governments, commitment and development budget in the border area is still relatively minimal. Third, flow policy describes several emerging priorities namely, development of processing industry, fishery and tourism in a sustainable manner in order to support the sector of maritime, increasing production and agricultural productivity, as well as self-reliance and food security community, Improved connectivity between regions and between the island and the means and basic infrastructure of society, Improving the quality of the environment and forestry, natural disaster mitigation and climate change, peningatan quality human resources and well-being equitable and civilized society, Improving the quality of public services and good governance.

Keywords: Agenda Setting, Planning Development, Border